



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA**
(Email : perindagkop.tobasamosir@gmail.com)



**KOMPLEK PERKANTORAN DESA SIMANJALO
BALIGE**



SALINAN

BUPATI TOBA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
 - Bab V Penutup
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 2. Verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- d. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Inspektorat Daerah

d. Dinas-Dinas:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Pertanian;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan-Badan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

f. Kecamatan:

1. Kecamatan Ajibata;
2. Kecamatan Balige;
3. Kecamatan Bonatua Lunasi;
4. Kecamatan Borbor;
5. Kecamatan Habinsaran;
6. Kecamatan Laguboti;
7. Kecamatan Lumban Julu;
8. Kecamatan Parmaksian;
9. Kecamatan Porsea;
10. Kecamatan Siantar Narumonda;
11. Kecamatan Sigumpar;
12. Kecamatan Silaen;
13. Kecamatan Tampahan;
14. Kecamatan Uluan;
15. Kecamatan Nassau;
16. Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal **15 JULI** 2022

BUPATI TOBA,

Cap/Dto.

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal **15 JULI** 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto.

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2022 NOMOR **25**

Salinan sesuai dengan aslinya,
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH.
PEMBINA TK.I
NIK-19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2023.

RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2023, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	Hal
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.. ..	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	32
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	59
3.3. Program dan Kegiatan.....	61
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	76
4.2. Pendanaan Indikatif.....	80
BAB V. PENUTUP.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan renja Perangkat daerah menjadi rancangan akhir renja perangkat daerah yang bertujuan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Rencana Kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya bertujuan untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Toba.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026. Visi Bupati / Wakil Bupati Toba periode 2021–2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”** dan Misi Pembangunan Kabupaten Toba yaitu :

1. **Infrastruktur yang Bagus dan Merata**

Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta kerentanan wilayah terhadap bencana alam. Pembangunan Infrastruktur dilakukan dengan tujuan

meningkatkan indeks Infrastruktur Kabupaten Toba dan dengan memperhatikan aspek pemerataan antar kecamatan.

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus kepada penguatan karakter masyarakat Toba yang berpendidikan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari dan bagi kepentingan banyak orang. Pembangunan karakter masyarakat ini diterapkan pada aparat pemerintahan dan masyarakat kabupaten Toba.

Sikap saling menghormati (*Somba*), sikap menghargai, berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata (*Manat*) dan sikap mengalah, mengajak, saling menghargai (*Elek*) menjadi landasan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan karakter masyarakat kabupaten Toba ini diharapkan dapat membentuk aparat pemerintahan yang dapat diandalkan.

3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera

Pertanian dan Peternakan adalah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Toba karena sekitar 70% penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan diharapkan akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Toba. Peningkatan produktivitas pada pertanian dan peternakan dilakukan melalui pendampingan petani, mekanisasi dan penerapan teknologi pertanian.

4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kabupaten Toba yaitu kebutuhan akan perlindungan dan jaminan kesehatan masyarakat. Penguatan jaminan kesehatan masyarakat Toba melalui JKN-KIS bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses layanan prima kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan kabupaten Toba melalui peningkatan akreditasi rumah sakit daerah dan kualitas pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan layanan kesehatan keliling.

5. Pariwisata Berkat dan Meriah

Mewujudkan pembangunan pariwisata yang menonjolkan sumber daya alam (SDA) kabupaten Toba dan kearifan lokal masyarakat Toba melalui pembenahan dan

peningkatan jumlah destinasi wisata dan meningkatkan aktraksi-aktraksi budaya. Pembangunan pariwisata melibatkan masyarakat, pelaku industri pariwisata, cendekiawan, dan budayawan. Pariwisata diharapkan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.

6. Membangun Iman yang terpelihara

Mewujudkan masyarakat Toba yang beragama (*Batak Na Marugamo*) yang berarti masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap saling mengasihi (holong), berkerjasama dan bergotong royong dalam melakukan pembangunan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kerukunan umat beragama sehingga lingkungan menjadi kondusif bagi masyarakat Kabupaten Toba.

7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana serta melindungi masyarakat dari penyakit sosial kemasyarakatan dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada hukum (*Namaruhum*) yakni sikap masyarakat yang patuh terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toba, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba berperan penting dalam mewujudkan Misi ke 5 yaitu Pariwisata Berkat dan Meriah melalui pencapaian pembangunan pariwisata diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap perekonomian daerah dimana Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian ikut didalamnya dalam mewujudkan perekonomian yang baik di Kabupaten Toba melalui peningkatan sarana prasarana dan pengamanan perdagangan, meningkatkan Pertumbuhan Industri, serta Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing quntuk menjadi pelaku ekonomi yang lebih baik lagi, dimana Kabupaten Toba bisa menjadi daerah tempat wisata yang maju dan terdepan dengan memiliki daya saing melalui peningkatan ekonomi yang didukung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing terhadap perekonomian daerah yang inklusif dimana dapat mendorong pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat, membuka kesempatan kerja serta dapat mengurangi Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT), menurunkan angka kemiskinan dan peluang tumbuhnya investasi dan sektor-sektor usaha ekonomi baru.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Toba memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan, yang sarasannya untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
17. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan Koperasi;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 TAHUN 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

- dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9).
 34. Peraturan Bupati Toba Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023;
 35. Peraturan Bupati Toba Nomor 49 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba;

36. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
37. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 272 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Kabupaten Toba Samosir;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah Tahun 2023 adalah sebagai acuan kerja dan memberikan arah, landasan yang kuat dan jelas serta sebagai alat kendali dan tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam satu tahun anggaran.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menciptakan Sinkronisasi, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah setiap tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Kabupaten Toba.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu terdiri dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2022), pencapaian Renstra s/d Tahun 2026, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Keterkaitannya dengan Renja Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merangkum rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang mengacu kepada renstra Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya dilaksanakan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun setiap tahunnya berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya pencapaian target kinerja tidak terlepas dari faktor-faktor tertentu seperti :

- a. Keterbatasan dana
- b. Keterbatasan data penunjang
- c. Kesiapan dari Perangkat Daerah yang menangani
- d. Keterbatasan Jumlah Pegawai dan Sumber Daya Manusia.

Hal ini tentu akan mengakibatkan implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, seperti ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga menimbulkan efek negatif terhadap pelayanan pemerintah, dengan demikian rancangan mengakibatkan banyaknya dana kegiatan yang tidak tepat sasaran dan tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, maka diambil beberapa kebijakan/tindakan berupa :

- a. Pengalokasian dana dengan penerapan skala prioritas
- b. Penyempurnaan data penunjang untuk pelaksanaan kegiatan
- c. Pematangan kesiapan tim kerja dalam penanganan kegiatan

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toba, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, telah menyusun program/kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis 2021-2026 yang

diarahkan pada pencapaian sasaran untuk Meningkatkan sarana distribusi dan logistik serta perlindungan konsumen, menjadikan pasar rakyat yang bersih, aman dan teratur, meningkatkan kualitas dan kuantitas Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing, meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang ramah lingkungan, serta Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi pelaku ekonomi masyarakat, antara lain :

- a. Program Pengembangan UMKM :
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi :
 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi :
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian :
 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Toba
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- h. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- i. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- j. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
- k. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- l. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
- m. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- n. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- o. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Tahun 2021.

Pembangunan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.112.299.544,- (Tujuh miliar seratus dua belas juta dua ratus sembilan

puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan realisasi Rp 6.679.624.684,- (Enam milliard enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan persentase 93,92%, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Tahun Anggaran 2021, untuk membiayai program :

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Pengembangan UMKM
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.2. Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terbagi menjadi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang yang membawa gambaran sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar:

A.1 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

1. UMKM yang memperoleh bantuan fasilitasi berupa peralatan
2. UMKM yang dilatih pada pelatihan kewirausahaan
3. Jumlah peserta pelatihan Pembinaan organisasi Dekopinda sebanyak 100 orang peserta.
4. Mengikuti Pameran pelaksanaannya dalam daerah, baik didalam Provinsi maupun luar Provinsi
5. Pelaksanaan RAT setiap tahunnya pada koperasi yang aktif
6. Koperasi yang mendapat pembinaan dan bantuan peralatan

B. Urusan Pilihan :

B.1. Perdagangan

1. Pasar Rakyat yang direhabilitasi dari dana DAU yaitu Revitalisasi Pasar Rakyat Balige (Pembuatan Kanopi Balerong) .
2. Pasar Rakyat yang direhabilitasi dari dana DAK yaitu Revitalisasi Pasar Inpres Balige.
3. Pembangunan Pasar Rakyat dari dana DAK terdiri dari 4 Pasar yaitu Pasar Rakyat Pintu Pohan Meranti, Pasar Rakyat Habinsaran, Pasar Rakyat Nassau, dan Pasar Rakyat Laguboti)
4. Ter-update data harga bahan kebutuhan pokok 33 Komoditi di 3 Pasar yaitu Balige, Laguboti dan Porsea) di Kabupaten Toba Samosir pada SIHARAPANKU.
5. Jumlah peredaran barang kadaluarsa meningkat.
6. Melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) Peredaran bahan makanan dan makanan olahan di 3 (tiga) pasar yaitu Pasar Balige, Pasar Laguboti dan Pasar Porsea sebanyak 6 kali sidak.

B.2. Perindustrian

1. Industri Kecil Menengah yang dilatih sekaligus mendapat bantuan peralatan
2. Sentra industri yang dibangun sebanyak 1 sentra.
3. IKM yang dibina dan difasilitasi
4. Pembangunan Pagar keliling pada Sentra Industri yang ada di Desa Sigal Kecamatan Uluan

B.3. Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

1. Jumlah PLTMH yang diresmikan dalam mengembangkan ketenagalistrikan sebanyak 1 PLMTH
2. Pemasangan Jaringan Listrik Ke tiap Dusun-dusun yang belum dialiri listrik

C. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang :

C.1. Keuangan

1. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017, Target sebesar Rp. 983.458.000,- Realisasi Rp. 821.703.470,- dengan Persentase 83,55%.
2. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018, Target sebesar Rp. 1.011.706.110,- Realisasi Rp. 929.059.960,- dengan Persentase 91,83%.
3. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019, Target sebesar Rp. 1.649.035.000,- Realisasi Rp. 1.429.530.420,- dengan Persentase 86,69%.
4. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020, Target sebesar Rp. 1.300.000.000,- Realisasi Rp. 1.330.218.550,- dengan Persentase 102,32%.
5. Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021, Target sebesar Rp. 1.649.035.000,- Realisasi Rp. 1.428.671.625,- dengan Persentase 86,64%.

Adapun capaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 (tahun lalu) Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :*

TABEL. TC-29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Toba
(Periode Semester II)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada akhir periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9= (8/7) x 100%		10=(6+8)		11=(10/5) x 100%	
		K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	%	12,56%	685.000.000	-	-	12,56	120.000.000		3.484.000	0	2,90	-	3.484.000	-	0,51
2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Jumlah Koperasi	Unit	42	685.000.000	-	-	25	120.000.000		3.484.000	0	2,90	-	3.484.000	-	0,51

	<i>wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>																
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	100	140.000.000	-	-	100	70.000.000		-	0	0,00	-	-	-	-
2.17.04.2.01	<i>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota</i>	Koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Koperasi Sehat	50	140.000.000	-	-	25	70.000.000			0	0,00	-	-	-	-
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	%	13,45	1.115.000.000	-	-	8,97	100.000.000		960.000	0	0,96	-	960.000	-	0,09

2.17.0 5.2.01	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	Orang	330	1.115.000.000	-	-	40	100.000.000		960.000	0	0,96	-	960.000	-	0,09
2.17.0 6	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	35,87	1.532.500.000	-	-	5,61	260.000.000		-	0	0,00	-	-	-	-
2.17.0 6.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	50	1.532.500.000	-	-	3	260.000.000			0	0,00	-	-	-	-
2.17.0 7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	15,97	3.279.059.000	-	-	1,80	441.000.000		-	0	0,00	-	-	-	-

2.17.0 7.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan</i>	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	7014	3.279.059.000	-	-	232	441.000.000			0	0,00	-	-	-	-
2.17.0 8	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	6,63	2.797.500.000	-	-	5,87	617.500.000		3.450.000	0	0,56	-	3.450.000	-	0,12
2.17.0 8.2.01	<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha</i>	Jumlah Wirausaha Baru	Wirausaha	512	2.797.500.000	-	-	22	617.500.000		3.450.000	0	0,56	-	3.450.000	-	0,12
3.30.0 2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan(IUPP/S IUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	31,43%	34,77	510.058.382	-	-	31,99	75.000.000		1.099.050	0	1,47	-	1.099.050	-	0,22

3.30.0 2.2.02	<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	Gudang	470	510.058.382	-	-	40	75.000.000	1.099.050	0	1,47	-	1.099.050	-	0,22
3.30.0 3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	%	100	8.811.250.000	-	-	12,50	1.210.000.000	140.374.000	0	11,60	-	140.374.000	-	1,59
3.30.0 3.2.01	<i>Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	Pasar	15	8.811.250.000	-	-	2	1.210.000.000	140.374.000	0	11,60	-	140.374.000	-	1,59
3.30.0 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	96,77	4.587.371.000	-	-	98,41	892.500.000	9.234.170	0	1,03	-	9.234.170	-	0,20
3.30.0 4.2.01	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg yang diawasi	Pelaku Usaha	800	571.012.000	-	-	70	105.000.000		0	0,00	-	-	-	-

3.30.0 4.2.02	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</i>	Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	Pasar	14	3.726.853.000	-	-	2	735.000.000	6.844.000	0	0,93	-	6.844.000	-	0,18
3.30.0 4.2.03	<i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang diawasi	Pelaku Usaha	70	289.506.000	-	-	10	52.500.000	2.390.170	0	4,55	-	2.390.170	-	0,83
3.30.0 6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	%	43,72	5.317.856.000	-	-	8,74	1.294.550.000	5.292.603	0	0,41	-	5.292.603	-	0,10
3.30.0 6.2.01	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	Unit	3331	5.317.856.000	-	-	300	1.294.550.000	5.292.603	0	0,41	-	5.292.603	-	0,10
3.30.0 7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	Jenis	7	3.595.562.000	-	-	6	625.000.000	1.801.554	0	0,29	-	1.801.554	-	0,05

3.30.0 7.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	Jenis	7	3.595.562.000	-	-	7	625.000.000	1.801.554	0	0,29	-	1.801.554	-	0,05
3.31.0 2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	%	7,27	17.769.728.112	-	-	6,71	3.561.770.112	136.028.942	0	3,82	-	136.028.942	-	0,77
3.31.0 2.2.01	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	3	17.769.728.112	-	-	3	3.561.770.112	136.028.942	0	3,82	-	136.028.942	-	0,77
3.31.0 3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	3.548.108.702	-	-	50,00	806.500.000	-	0	0,00	-	-	-	-
3.31.0 3.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin yang dikeluarkan	Izin	113	3.548.108.702	-	-	3	806.500.000	-	0	0,00	-	-	-	-

	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota																
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	12	2.627.500.000	-	-	2	500.000.000		4.216.000	0	0,84	-	4.216.000	-	0,16
3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Informasi industri	Dokumen	4	2.627.500.000	-	-	4	500.000.000		4.216.000	0	0,84	-	4.216.000	-	0,16
02.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	32.994.878.235	-	-	100	6.423.038.154	5,56	882.596.314	5,56	13,74	5,56	882.596.314	5,56	2,67
2.17.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	447.809.000	-	-	100	84.000.000		12.272.000	0	14,61	-	12.272.000	-	2,74

2.17.0 1.2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	%	37	17.763.412.500	-	-	100	3.565.000.000	25,00	431.120.864	25,00	12,09	25,00	431.120.864	67,57	2,43
2.17.0 1.2.03	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	25	40.000.000	-	-	100	70.000.000			0	0,00	-	-	-	-
2.17.0 1.2.04	<i>Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	%	100	285.506.000	-	-	100	52.500.000			0	0,00	-	-	-	-
2.17.0 1.2.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	77,78	541.250.000	-	-	100	200.000.000			0	0,00	-	-	-	-
2.17.0 1.2.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Umum	%	100	4.381.276.622	-	-	100	882.700.000		224.809.733	0	25,47	-	224.809.733	-	5,13
2.17.0 1.2.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	%	100	2.954.208.000	-	-	100	253.588.000		-	0	0,00	-	-	-	-
2.17.0 1.2.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100	5.067.056.000	-	-	100	1.002.750.000	25,00	159.098.102	25,00	15,87	25,00	159.098.102	25,00	3,14

2.17.0 1.2.09	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	%	100	1.554.360.113	-	-	100	312.500.154	55.295.615	0	17,69	-	55.295.615	-	3,56
					89.311.371.431				16.996.858.266	1.188.536.633				1.188.536.633		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba kepada masyarakat pada dasarnya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan perlindungan serta kepastian hukum atas usaha masyarakat dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, maka Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba meliputi berbagai Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang saling mendukung, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, dengan peraturan daerah ini dibentuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral dan pasar. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba yang akan dituangkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, jabatan pratama tinggi/eselon II.b;
- b. Sekretariat, jabatan administrator/eselon III.a terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- c. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi, jabatan pengawas/eselon IV.a;

2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jabatan pengawas/eselon IV.a.
- d. Bidang Perdagangan, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 1. Seksi Kemetrologian, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- e. Bidang Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Sandang, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Industri Pangan, Agro, Hasil Hutan, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), jabatan pengawas/eselon IV.a.
- f. Bidang Pasar Rakyat, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pasar Rakyat, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Verifikasi, Pengawasan dan Penertiban Pasar Rakyat, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba

NO	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	5	6	7	15	16	15	16	17
	<u>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</u>											
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		%	10,00%	12,56%	12,56%	12,56%	5,51%	0,00	12,56%	12,56%	belum tercapai
2	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		%	50,00%	100%	100%	100%	1,47%	0,00	100%	100%	belum tercapai
3	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten		%	12,50%	8,97%	8,97%	11,21%	12,50%	0,00	8,97%	11,21%	belum tercapai
4	Persentase koperasi yang berkualitas		%	5,00%	5,61%	5,61%	6,73%	4,41%	0,00	5,61%	6,73%	belum tercapai

5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		%	7,00%	1,80%	1,80%	1,80%	3,45%	0,00	1,80%	1,80%	belum tercapai
6	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha		%	100%	5,87%	6,12%	6,38%	201,78%	0,00	6,12%	6,38%	belum tercapai
	URUSAN PERDAGANGAN											
7	Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/UTS/SIUP Toko Swalayan		%	8,69%	31,99%	32,68%	33,38%	8,69%	0,00	32,68%	33,38%	belum tercapai
8	Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		%	100%	12,50%	12,50%	12,50%	87,50%	0,00	12,50%	12,50%	belum tercapai
9	Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok		%	100%	98,41%	96,78%	96,77%	53,62%	0,00	96,78%	96,77%	belum tercapai
10	Persen Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku		%	100%	8,74%	17,49%	29,15%	2,44%	0,00	17,49%	29,15%	belum tercapai
11	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat regional dan tingkat Nasional		Jenis	7	6	6	7	7	0,00	6	7	belum tercapai

	URUSAN PERINDUSTRIAN											
12	Pertumbuhan Industri		%	4,00%	6,71%	6,85%	7,06%	9,45%	0,00	6,85%	7,06%	belum tercapai
13	Persen Jumlah Hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		%	0,64%	50,00%	56,00%	66,67%	0,64%	0,00	56,00%	66,67%	belum tercapai
14	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Dokumen	2	2	2	2	2	0,00	2	2	belum tercapai
15	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah		%	100%	100%	100%	100%	100%	0,25	100%	100%	belum tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dengan mengacu pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba serta sasaran RPJMD, maka Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- d. Pembinaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam secara berkala;
- e. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi Berprestasi/Terbaik pada berbagai tingkatan;
- f. Fasilitasi pembiayaan dan Pengendalian kredit program dan dana bergulir ;
- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Terknis dan Manajemen bagi Koperasi dan UMKM;
- h. Mengikutsertakan Koperasi dan UMKM dalam berbagai kesempatan pameran/promosi;
- i. Pengembangan Pola – Pola Kemitraan;
- j. Penyediaan informasi teknologi, pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Sumber Daya Manusia;
- k. Pengembangan Sentra – Sentra Industri mengarah pada Klaster;
- l. Penyuluhan dan Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- m. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002

- tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Pelayanan Perijinan Usaha untuk TDP dan SIUP dengan waktu proses masing-masing 5 hari kerja;
- n. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Industri, Perdagangan dan Gudang;
 - o. Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha Koperasi dan UMKM;
 - p. Pemantauan dan pencatatan perkembangan harga eceran bahan pokok dan barang strategis;
 - q. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dilakukan setiap bulan;
 - r. Pengawasan barang yang beredar yang ada dipasaran dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan;

Adapun yang menjadi permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam menjalankan fungsi pelayanannya adalah:

1. Keterbatasan dalam infrastruktur sehingga menghambat perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat.
2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM sehingga menyebabkan rendahnya produktifitas dan kreatifitas dalam mengelola SDM.
3. Akses dan tingkat penerapan teknologi untuk menggerakkan sektor riil masih rendah.
4. Kondisi permintaan barang dan jasa berkualitas oleh sektor rumahtangga dan sektor-sektor lainnya terus meningkat, sementara daerah belum mampu memenuhinya.
5. Produk yang dihasilkan oleh daerah belum stabil dan berkelanjutan (sustainable).
6. Daya saing daerah dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasa ke daerah lain masih lemah.
7. Jiwa kewirausahaan masyarakat belum berkembang.
8. Pengelolaan SDA di berbagai sektor masih sangat minim.
9. Distribusi pendapatan penduduk belum merata, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
10. Lemahnya organisasi pengusaha untuk menggalang potensi pengusaha yang ada.

11. Belum tersedianya sarana maupun prasarana pembangunan sentra-sentra industri.

Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur;
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
- d. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM serta IKM;
- e. Kurangnya koordinasi untuk membubarkan Koperasi yang tidak aktif sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- f. Kurangnya inovasi produk;
- g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM serta IKM;
- h. Kesadaran pelaku Koperasi dan UMKM serta IKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah;
- i. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;
- j. Pengambilan kebijakan pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- k. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah;
- l. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- m. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif;
- n. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UMKM dalam tertib hukum dan tertib niaga.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD dapat dilihat dari tabel SWOT berikut :

Analisis Lingkungan Internal	Analisis Lingkungan Eksternal
<p>A. Faktor-faktor Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi yang jelas; b. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan; c. Jumlah Koperasi, UMKM yang terus berkembang; d. Kewenangan Otonomi Daerah; 	<p>A. Faktor-faktor Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah; 2. Tersedianya potensi usaha; 3. Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;

	<p>4. Pangsa pasar yang semakin terbuka dengan diberlakukannya MEA; Terbukanya lapangan kerja.</p>
<p><i>B. Faktor-faktor Kelemahan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis dengan kebijakan sebelumnya/sudah ada; b. Sarana/prasarana yang kurang memadai; c. Dana operasional yang terbatas; d. Profesionalisme SDM Aparatur dan Koperasi dan UMKM belum optimal; e. Kemitraan masih belum optimal terhadap keberpihakan pada pola binaan; f. Penerapan Teknologi Industri yang masih sederhana; g. Keterbatasan penguasaan pasar. 	<p><i>B. Faktor-faktor Tantangan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Koperasi dan UKM yang aktif, sehat dan berdaya saing 2. Meningkatkan Perekonomian sektor Riil serta pengembangan skala usaha Koperasi dan UKM 3. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor industri 4. Meningkatkan Daya Saing Industri Unggulan 5. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam negeri 6. Peningkatan Kualitas Perlindungan Konsumen 7. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 8. Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Perdagangan

Formulasi Isu-isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023.

Rumusan Perubahan Internal :

- a. Meningkatkan kemampuan dan disiplin personil/pelaksana;
- b. Optimalisasi dan rasionalisasi penggunaan anggaran;
- c. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara optimal sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;

Rumusan Perubahan Eksternal :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) tentang peraturan dan perundang-undangan dibidang

Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba;

- b. Melakukan fasilitasi permodalan dalam bentuk peralatan dan perluasan jaringan pemasaran produk Koperasi, UMKM dan IKM secara optimal;
- c. Meningkatkan keterampilan dan motivasi usaha bagi Koperasi, UMKM dan IKM;
- d. Menerapkan teknologi industri tepat guna dalam peningkatan daya saing produk;
- e. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan persuasif kepada para pelaku usaha agar para pelaku usaha senantiasa bersedia secara aktif dalam memberikan laporan mengenai perkembangan usahanya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Toba, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, adapun review terhadap rancangan awal RKPD meliputi program/kegiatan/Sub Kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Toba telah disusun rencana Program Kegiatan Tahun 2023 yang terdiri dari 14 Program, 23 Kegiatan dan 51 Sub kegiatan, yang dapat dilihat pada Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Toba

**DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN
 DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.314.827.080	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.314.827.080	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	88.200.000	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	88.200.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	55.125.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	55.125.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	33.075.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	33.075.000	

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	<i>Kegiatan Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	3.588.250.000	<i>Kegiatan Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	3.588.250.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	37	3.588.250.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	37	3.588.250.000
	<i>Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	100%	55.125.000	<i>Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	100%	55.125.000
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	55.125.000	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	55.125.000
	<i>Kegiatan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Kegiatan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	11,11 %	110.250.000	<i>Kegiatan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Kegiatan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	11,11%	110.250.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	15	50.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	15	50.000.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	60.250.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	60.250.000

			undangan								
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	763.108.000	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	763.108.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	55.125.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	55.125.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	37	77.175.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	37	77.175.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	24	55.858.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	24	55.858.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	306.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	306.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	53.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	53.200.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	35.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	2	180.750.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	180.750.000	

SKPD		Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD					
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	442.880.000	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	442.880.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3	154.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3	154.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3	152.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3	152.500.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2	78.180.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2	78.180.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	58.200.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	58.200.000
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	1.010.637.000	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	1.010.637.000
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya	3	60.637.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	60.637.000

			air dan listrik yang disediakan							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	950.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	950.000.000
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	256.377.080	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	256.377.080
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajak nya	4	108.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajak nya	4	108.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak nya dan perizinannya	4	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak nya dan perizinannya	4	10.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	102	67.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	102	67.000.000

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	26.250.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	26.250.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah Saranadan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	45.127.080	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah Saranadan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	45.127.080
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Toba	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56 %	105.000.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Toba	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56%	105.000.000
	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah</i>		Jumlah Koperasi	9	105.000.000	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah</i>		Jumlah Koperasi	9	105.000.000
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan		Jumlah Koperasi Aktif yang diperiksa dan diawasi	52	105.000.000	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan		Jumlah Koperasi Aktif yang diperiksa dan diawasi	52	105.000.000

	Kabupaten Kota					Kabupaten Kota					
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kabupaten Toba	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	8,97%	315.000.000	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kabupaten Toba	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	8,97%	315.000.000	
	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	40	315.000.000	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	40	315.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	80	315.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	80	315.000.000	
4	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Kabupaten Toba	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	5,61%	105.000.000	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Kabupaten Toba	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	5,61%	105.000.000	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Koperasi yang berkualitas	3	105.000.000	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Koperasi yang berkualitas	3	105.000.000	

	sub kegiatan pemberdayaan peningkatan roduktivitas,Nilai tambah,akses pasar ,akses pembiayaan ,penguatan kelembagaan ,penataan manajemen ,standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	7	105.000.000	sub kegiatan pemberdayaan peningkatan roduktivitas,Nilai tambah,akses pasar ,akses pembiayaan ,penguatan kelembagaan ,penataan manajemen ,standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	7	105.000.000	
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kabupaten Toba	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	21,55 %	618.050.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kabupaten Toba	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	21,55%	618.050.000	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan</i>		Jumlah UMKM yang diberdayakan	232	618.050.000	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan</i>		Jumlah UMKM yang diberdayakan	232	618.050.000	
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	500	77.175.000	Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	500	77.175.000	

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan usaha Mikro	15	270.375.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan usaha Mikro	15	270.375.000
	Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30	100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30	100.000.000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dari Pendampingan Terhadap usaha Mikro	15	120.500.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dari Pendampingan Terhadap usaha Mikro	15	120.500.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	8	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	8	50.000.000
6	Program Pengembangan UMKM	Kabupaten Toba	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	5,87%	580.000.000	Program Pengembangan UMKM	Kabupaten Toba	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	5,87%	580.000.000
	<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha</i>		Jumlah Wirausaha Baru	22	580.000.000	<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha</i>		Jumlah Wirausaha Baru	22	580.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan	50	580.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan	50	580.000.000

	Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan Teknologi		Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan Teknologi		serta Desain dan Teknologi			
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kabupaten Toba	Pertumbuhan Industri	6,71%	3.887.358.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kabupaten Toba	Pertumbuhan Industri	6,71%	3.887.358.000	
	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri		3.887.358.000	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri		3.887.358.000	
	Sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2	300.000.000	Sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2	300.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5	320.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5	320.500.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	3	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	3	50.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	3.216.858.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	3.216.858.000	
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	50,00 %	633.048.351	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	50,00%	633.048.351	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri		Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin yang dikeluarkan	10	633.048.351	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri		Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin yang dikeluarkan	10	633.048.351	

	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan, Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	2	310.250.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan, Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	2	310.250.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2	322.798.351	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2	322.798.351	
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi	Kabupaten Toba	Informasi Data Industri	2	500.000.000	Program Pengelolaan Sistem	Kabupaten Toba	Informasi Data Industri	2	500.000.000	

	Industri Nasional					Informasi Industri Nasional					
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Informasi industri	4	500.000.000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Informasi industri	4	500.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data industri, Data Kawasan Industri Serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	500.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data industri, Data Kawasan Industri Serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	500.000.000	
10	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kabupaten Toba	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUP P/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	32,68 %	80.516.382	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kabupaten Toba	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUP P/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	32,68%	80.516.382	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	40	80.516.382	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	40	80.516.382	

	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	40	80.516.382	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	40	80.516.382	
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Toba	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	12,50 %	1.498.750.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Toba	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	12,50%	1.498.750.000	
	<i>Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	2	1.498.750.000	<i>Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	2	1.498.750.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Saran Distribusi Perdagangan	2	898.750.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Saran Distribusi Perdagangan	2	898.750.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	600.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	600.000.000	
12	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kabupaten Toba	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	98,41 %	916.625.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kabupaten Toba	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	98,41%	916.625.000	
	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah Barang Kadaluaarsa dan LPG 3 Kg yang diawasi	70	110.250.000	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah Barang Kadaluaarsa dan LPG 3 Kg yang diawasi	70	110.250.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	110.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	110.250.000
	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>		Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	2	751.250.000	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>		Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	2	751.250.000
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah laporan pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1	200.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah laporan pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1	200.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	2	551.250.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	2	551.250.000
	<i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah</i>		Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang diawasi	10	55.125.000	<i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah</i>		Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang diawasi	10	55.125.000

	<i>Kabupaten/Kota</i>					<i>Kabupaten/Kota</i>					
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestsida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestsida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	1	55.125.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestsida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestsida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	1	55.125.000	
13	Program Standadisasi dan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Toba	Persentase Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	8,74%	1.102.075.000	Program Standadisasi dan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Toba	Persentase Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	8,74%	1.102.075.000	
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>		Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	300	1.102.075.000	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>		Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	300	1.102.075.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	600	906.950.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	600	906.950.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120	195.125.000	Sub Kegiatan Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120	195.125.000	
14	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kabupaten Toba	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional	6	661.250.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kabupaten Toba	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional danTingkat Nasional	6	661.250.000	

	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	7	661.250.000	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	7	661.250.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	451.250.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	451.250.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	210.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	210.000.000	
			Jumlah		17.317.499.813			Jumlah		17.317.499.813	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tata Cara Penampungan Aspirasi melalui Musrenbang dalam rangka pelaksanaan penampungan aspirasi, dibentuk kelompok yang terdiri dari perwakilan dari desa. Kelompok satu membahas bidang sarana dan prasarana fisik, Kelompok Dua membahas bidang perekonomian, Kelompok Tiga membahas bidang sosial dan budaya. Hasil pembahasan setiap kelompok akan dituangkan dalam Berita Acara yang akan ditandatangani oleh Tim di tingkat Kecamatan dan Berita Acara tersebut akan dibawa ke tingkat Kabupaten untuk pembahasan selanjutnya di tingkat Propinsi dan Pusat.

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2023, memiliki Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan ada 2 yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang terdiri dari Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang terdiri dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Aspirasi Masyarakat peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada Kelompok Ekonomi menyampaikan beberapa usulan/saran yang dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Toba sebagai berikut :

TABEL T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN TOBA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Pengembangan UMKM		Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha		
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha		Jumlah Wirausaha Baru		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasara, SDM Serta Desain dan Teknologi	1. Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	2 Kelompok untuk mengikuti Pelatihan Pengolahan Aneka makanan	Musrenbang Kecamatan
		2. Lumban Huala Kecamatan Parmaksian		1 Kelompok untuk mengikuti Pelatihan Pengolahan Aneka makanan	Musrenbang Kecamatan
		3. Desa Lumban Sitorus Kecamatan Parmaksian		2 Kelompok untuk mengikuti Pelatihan Pengolahan Aneka makanan	Musrenbang Kecamatan
		4. Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige		1 Kelompok untuk mengikuti Pelatihan Pengolahan	Musrenbang Kecamatan

				Aneka makanan	
		5. Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian		1 Kelompok untuk mengikuti Pelatihan Pengolahan Aneka makanan	Musrenbang Kecamatan
		6. Desa Dolok Nauli Kecamatan Parmaksian		1 Kelompok untuk mengikuti Pelatihan Pengolahan Aneka makanan	Musrenbang Kecamatan
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Pertumbuhan Industri		
	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Dusun I Banjar Ganjang Kecamatan Parmaksian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Kelompok Untuk mengikuti pelatihan tenun	Musrenbang Kecamatan
		2. Desa Paindoan Kecamatan Balige		1 Kelompok Untuk mengikuti pelatihan tenun	Musrenbang Kecamatan
		3. Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan		2 Kelompok Untuk mengikuti pelatihan tenun	Musrenbang Kecamatan

		4. Desa Maju Kecamatan Sigumpar		1 Kelompok Untuk mengikuti pelatihan tenun	Musrenbang Kecamatan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Desa Lumban Sitorus Kecamatan Parmaksian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Fasilitasi Alat Tenun Gedogan untuk 2 kelompok petenun	Musrenbang Kecamatan
		2. Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian		Fasilitasi Alat Tenun Gedogan untuk 1 kelompok petenun	Musrenbang Kecamatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Peningkatan Pengawasan dan perlindungan Konsumen	Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	RPJMN 2020-2024
2.	Peningkatan Kemampuan SDM dibidang Kemetrolagian	Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	RPJMN 2020-2024
3.	Mendorong Pertumbuhan Industri Dalam Negeri dengan gerakan “Aku Cinta Indonesia”	Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	RPJMN 2020-2024
4.	Pembinaan Terhadap Penumbuhan Wirausaha Baru sehingga mampu menciptakan lapangan kerja	Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	RPJMN 2020-2024
5.	Meningkatkan Kemitraan Usaha antar usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM	RPJMN 2020-2024
6.	Meningkatkan Kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM	RPJMN 2020-2024
7.	Meningkatkan Kapasitas, jangkauan dan inovasi koperasi	Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM	RPJMN 2020-2024

Program pengentasan kemiskinan seperti pembangunan infrastruktur (pasar), penambahan modal kerja koperasi sektor riil, dan bantuan perkuatan permodalan koperasi unit simpan pinjam adalah suatu instrumen pemerintah yang digulirkan untuk mencapai suatu tujuan nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Program ini akan menyatukan berbagai program yang dimiliki berbagai instansi dibawah satu organisasi tim penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan yang melibatkan semua urusan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah **“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM”**, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja
2. Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi
3. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan
4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri
5. Meningkatnya Pembinaan IKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi
6. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif

Tujuan sebagai berikut :

1. Terciptanya persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha, dan perlindungan produsen/konsumen dengan cara pengawasan peredaran barang dan jasa di Kabupaten Toba.
2. Tertatanya pasar rakyat dengan baik dan kondusif
3. Industri Kecil Menengah dapat berkembang dengan mengoptimalkan penggunaan potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Toba. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Toba terdaftar dan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya mineral Kabupaten Toba oleh pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi dan industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
5. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Toba dapat tumbuh dan mampu bersaing dengan pasar global.

Sasaran pembangunan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat;
2. Meningkatnya pengelolaan produk unggulan daerah;
3. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif;
4. Meningkatnya jumlah dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah yang aktif;
5. Menurunkan Angka Kemiskinan bagi pelaku UMKM dan IKM;
6. Meningkatnya jumlah industri kecil menengah yang produktif;
7. Terbentuknya sentra-sentra industri dan assosiasi industri;
8. Meningkatnya inovasi produk industri kecil menengah;
9. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha;
10. Terciptanya tertib hukum niaga bagi konsumen dan pelaku usaha;
11. Tertatanya kawasan perdagangan melalui pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat.
12. Peningkatan Kemampuan SDM dibidang Kemetrolgian

Telaahan terhadap visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Toba terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 5 (lima) yaitu : Misi ke 5 (lima) : “**Pariwisata Berkat dan Meriah**”. Pada misi ini peran serta Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam membangun pariwisata berkat dan meriah dengan mempromosikan produk-produk unggulan daerah Kabupaten Toba melalui event-event/pameran baik ditingkat nasional maupun regional.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Toba yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba secara langsung mempunyai peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Toba terpilih kedepannya. Demi mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toba Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian harus berperan aktif mensukseskan Pembangunan Kabupaten Toba.

3.3 Program dan Kegiatan

- 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2023 dalam merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :
- a. Pencapaian Visi dan Misi “Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar ”.
 - b. Peningkatan jumlah jenis dan mutu produk unggulan daerah.
 - c. Mewujudkan Pembangunan Pariwisata yang menonjolkan sumber daya alam Kabupaten Toba dan Kearifan lokal masyarakat Toba melalui pembenahan dan peningkatan jumlah destinasi wisata dan meningkatkan aktrasi-aktrasi budaya.

3.3.2 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang direncanakan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2022 sebanyak 14 Program, 23 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2023 yang didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel TC-33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba sebagai berikut :

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN TOBA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
		Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	02.17.01	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan perindustrian	100%	6.314.827.080	DAU	-	100%	6.475.821.454
	2.17.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		100%	88.200.000			100%	92.609.000
	2.17.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	55.125.000			4	57.881.000
	2.17.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan		4	33.075.000			4	34.728.000

2.17.01.2.02	<i>Kegiatan Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	%		100%	3.588.250.000			100%	3.610.162.500
2.17.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		37	3.588.250.000			37	3.610.162.500
2.17.01.2.04	<i>Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	%		100%	55.125.000			100%	57.881.000
2.17.01.2.04.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		4	55.125.000			4	57.881.000
2.17.01.2.05	<i>Kegiatan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%		100%	110.250.000			100%	110.000.000
2.17.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Orang		15	50.000.000			15	55.000.000
2.17.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang		5	60.250.000			5	55.000.000
2.17.01.2.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Cakupan Layanan Administrasi Umum	%		100%	763.108.000			100%	762.037.000
2.17.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalsi/listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket		4	55.125.000			4	57.881.000
2.17.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		4	77.175.000			4	81.033.000

2.17.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket		4	55.858.000			4	54.513.000
2.17.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket		4	306.000.000			4	306.000.000
2.17.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	53.200.000			4	62.610.000
2.17.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen		4	35.000.000			4	50.000.000
2.17.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		4	180.750.000			4	150.000.000
2.17.01.2.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	%		100%	442.880.000			100%	485.325.000
2.17.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit		3	154.000.000			3	100.000.000
2.17.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		3	152.500.000			3	180.125.000
2.17.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit		2	78.180.000			2	117.000.000

2.17.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	58.200.000			2	88.200.000
2.17.01.2.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%		100%	1.010.637.000			100%	1.013.669.000
2.17.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan		4	60.637.000			4	63.669.000
2.17.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan		4	950.000.000			4	950.000.000
2.17.01.2.09	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	%		100%	256.377.080			100%	344.137.954
2.17.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		4	108.000.000			4	158.000.000
2.17.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Unit		4	10.000.000			4	10.000.000
2.17.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit		102	67.000.000			102	70.000.000

	2.17.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	26.250.000			1	68.250.000
	2.17.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	45.127.080			1	37.887.954
2	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten		Kabupaten Toba	12,56%	105.000.000	DAU	-	13,00%	100.000.000
	2.17.03.2.01	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah</i>	Jumlah Koperasi	Unit		7	105.000.000			7	100.000.000
	2.17.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeriksaan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha		52	105.000.000			52	100.000.000
3	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	%	Kabupaten Toba	8,97%	315.000.000	DAU	-	8,97%	200.000.000

	2.17.05.2.01	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	Orang		80	315.000.000			80	200.000.000
	2.17.05.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang		80	315.000.000			80	200.000.000
4	2.17.06	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	Kabupaten Toba	5,61%	105.000.000	DAU	-	5,61%	200.000.000
	2.17.06.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi		2	105.000.000			2	200.000.000
	2.17.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, akses pasar, akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha koperasi kewenang	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Unit Usaha		7	105.000.000			7	200.000.000
5	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	Kabupaten Toba	21,55%	618.050.000	DAU	-	10,00%	706.209.000

	2.17.07.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM		500	618.050.000			500	706.209.000
	2.17.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dokumen		4	77.175.000			4	78.000.000
	2.17.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan usaha Mikro	Unit Usaha		15	270.375.000			15	100.000.000
	2.17.07.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha		30	100.000.000			30	100.000.000
	2.17.07.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dari Pendampingan Terhadap usaha Mikro	Unit Usaha		15	120.500.000			1,80%	378.209.000
	2.17.07.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang		8	50.000.000			8	50.000.000
6	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	Kabupaten Toba	6,12%	580.000.000	DAU	-	6,12%	500.000.000

	2.17.08.2.01	<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha</i>	Jumlah Wirausaha Baru	Wirausaha		23	580.000.000			23	500.000.000
	2.17.08.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		50	580.000.000			50	500.000.000
		Urusan Pemerintahan Pilihan									
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
7	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	%	Kabupaten Toba	6,85%	3.887.358.000	DAU	-	6,85%	3.350.000.000
	3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen		3	3.887.358.000			3	3.350.000.000
	3.31.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		4	300.000.000			4	-
	3.31.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen		4	320.500.000			4	300.000.000
	3.31.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Dokumen		4	50.000.000			4	50.000.000

	3.31.02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		4	3.216.858.000			4	3.000.000.000
8	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Kabupaten Toba	56,00%	633.048.351			56,00%	638.560.351
	3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin yang dikeluarkan	Izin		14	633.048.351			14	638.560.351
	3.31.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan, Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen		4	310.250.000			4	315.762.000

	3.31.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		4	322.798.351			4	322.798.351
9	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Informasi Data Industri	Dokumen	Kabupaten Toba	2	500.000.000			2	525.000.000
	3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi industri	Dokumen		4	500.000.000			4	525.000.000
	3.31.04.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data industri, Data Kawasan Industri Serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen		4	500.000.000			4	525.000.000
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
10	3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	Kabupaten Toba	32,68%	80.516.382	DAU	-	32,68%	84.542.000

	3.30.02.2.02	<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	Gudang		50	80.516.382			50	84.542.000
	3.30.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen		4	80.516.382			4	84.542.000
11	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	%	Kabupaten Toba	12,50%	1.498.750.000	DAU	-	12,50%	1.952.500.000
	3.30.03.2.01	<i>Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	Pasar		3	1.498.750.000			3	1.952.500.000
	3.30.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Saran Distribusi Perdagangan	Unit		1	898.750.000			1	1.302.500.000
	3.30.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		50	600.000.000			50	650.000.000
12	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	Kabupaten Toba	96,78%	916.625.000	DAU	-	96,78%	756.246.000
	3.30.04.2.01	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg yang diawasi	Pelaku Usaha		150	110.250.000			150	115.762.000
	3.30.04.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan		4	110.250.000			4	115.762.000

	3.30.04.2.02	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	Pasar		2	751.250.000			2	582.603.000
	3.30.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan		4	200.000.000			4	210.000.000
	3.30.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Laporan		4	551.250.000			4	372.603.000
	3.30.04.2.03	<i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang diawasi	Pelaku Usaha		10	55.125.000			10	57.881.000
	3.30.04.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan		4	55.125.000			4	57.881.000
13	3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	%	Kabupaten Toba	17,49%	1.102.075.000	DAU	-	17,49%	1.218.131.000

	3.30.06.2.01	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	Unit		500	1.102.075.000			500	1.218.131.000
	3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		600	906.950.000			600	1.050.000.000
	3.30.06.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang		120	195.125.000			120	168.131.000
14	3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	Jenis	Kabupaten Toba	6	661.250.000	DAU	-	6	778.812.000
	3.30.07.2.01	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	Jenis		7	661.250.000			7	778.812.000
	3.30.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM		10	451.250.000			10	578.812.000
	3.30.07.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen		4	210.000.000			4	200.000.000
Jumlah							17.317.499.813				17.485.821.805

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi :
 - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian :
 - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Toba
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
 - Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
5. Program Pengembangan UMKM :
- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat
 - Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
 - Pelaksanaan Operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

9. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi legal
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 - Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
 - Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
12. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

4.2. Pendanaan Indikatif

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba pada Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba 2021-2026 direncanakan anggaran sebesar **Rp 17.317.499.813,-** (Tujuh belas miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang bersumber dari dana APBD.

Rencana pelaksanaan program kerja, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Pilihan ada 2 (dua) yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Untuk mencapai sasaran dan target dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja ini dibutuhkan dana/anggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba.

Adapun rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel T-C. 33A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2023.

TABEL T-C.33 A

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Sum ber Dana	OPD Pen angg ung Jaw ab	Je nis Ke giat an
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan						
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
1	02.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangu nan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendoron g sektor pariwisata, pertanian	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan perindustrian							6.314.827.080	6.475.821.454	DAU	Dina s Koperasi, Usaha Kecil Men eng ah, Perd	

			dan produk unggulan lokal													agangnan dan Perindustrian Kabupaten Toba
1	2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										88.200.000	92.609.000			
	2.17.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	55.125.000	57.881.000			

	2.17.01 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	33.075.000	34.728.000			
2	2.17.01.2.02	Kegiatan Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.588.250.000	3.610.162.500			
	2.17.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Keuangan terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	3.588.250.000	3.610.162.500			
3	2.17.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah										55.125.000	57.881.000			

	2.17.01.2.04.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Pendapatan Daerah terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	55.125.000	57.881.000			
4	2.17.01.2.05	Kegiatan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										110.250.000	110.000.000			
	2.17.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan baik	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50.000.000	55.000.000			
	2.17.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan baik	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	60.250.000	55.000.000			
5	2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										763.108.000	762.037.000			
	2.17.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Umum terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4 Paket	55.125.000	57.881.000			

										Disediakan						
2.17.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Umum terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	77.175.000	81.033.000				
2.17.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Umm terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	55.858.000	54.513.000				
2.17.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Umm terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	306.000.000	306.000.000				
2.17.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Umm terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	53.200.000	62.610.000				

2.17.01.2.06 .06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Umm terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	35.000.000	50.000.000			
2.17.01.2.06 .09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Layanan Administrasi Umm terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	180.750.000	150.000.000			
2.17.01.2.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>											442.880.000	485.325.000			
2.17.01.2.07 .01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 unit	154.000.000	100.000.000			

2.17.01.2.07 .02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	152.500.000	180.125.000			
2.17.01.2.07 .05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	78.180.000	117.000.000			
2.17.01.2.07 .10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	58.200.000	88.200.000			
2.17.01.2.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>										1.010.637.000	1.013.669.000			

2.17.01.2.08 .02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	60.637.000	63.669.000			
2.17.01.2.08 .04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	950.000.000	950.000.000			
2.17.01.2.09	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>										256.377.080	344.137.954			
2.17.01.2.09 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	108.000.000	158.000.000			

2.17.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	10.000.000	10.000.000			
2.17.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	102 unit	67.000.000	70.000.000			
2.17.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	26.250.000	68.250.000			
2.17.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.				Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	45.127.080	37.887.954			

2	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan produk unggulan lokal	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba							105.000.000	100.000.000	D A U	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba
	2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah										105.000.000	100.000.000		

	2.17.03.2.01 .02	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten Kota				persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56 %	Periksaan dan Pengawasan Koperasi terlaksana dengan baik	7 Unit usaha	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota kinerja	52 unit usaha	105.000.000	100.000.000			
4	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan produk unggulan lokal	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba							315.000.000	200.000.000	DAU	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	

	2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota									315.000.000	200.000.000				
	2.17.05.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	8,97%	Meningkatnya Jumlah SDM Koperasi yang berkualitas	80 orang	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	80 orang	315.000.000	200.000.000			
5	2.17.06	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan produk unggulan lokal	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angka Kemiskinan.	Kabupaten Toba							105.000.000	200.000.000	DAU	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

Kota

6	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan produk unggulan lokal	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba							618.050.000	706.209.000	D A U	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba
---	---------	---	--	---	----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

2.17.07.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan</i>										618.050.000	706.209.000			
2.17.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pengembangan Usaha Mikro				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80%	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	100%	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4 dokumen	77.175.000	78.000.000			

2.17.07.2.01 .02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80%	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	100%	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan Usaha Mikro	15 unit usaha	270.375.000	100.000.000			
2.17.07.2.01 .03	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80%	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	100%	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	30 unit usaha	100.000.000	100.000.000			

2.17.07.2.01 .04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80%	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	100%	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	15 unit usaha	120.500.000	378.209.000			
2.17.07.2.01 .05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80%	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	100%	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	8 orang	50.000.000	50.000.000			

7	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan produk unggulan lokal	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba							580.000.000	500.000.000	D A U	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba
	2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha										580.000.000	500.000.000		

	2.17.08.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan Teknologi				Meningkatnya Usaha kecil yang menjadi wirausaha	6,12%	Meningkatnya JumlahUMKM yang dibangun dan difasilitasi	50 unit usaha	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	50 unit usaha	580.000.000	500.000.000			
		Urusan Pemerintahan Pilihan														
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian														
8	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan produk unggulan lokal	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angka Kemiskinan.	Kabupaten Toba							3.887.358.000	3.350.000.000	DAU	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

	3.31.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				Pertumbuhan Industri	6,85%	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 dokumen	50.000.000	50.000.000			
	3.31.02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				Pertumbuhan Industri	6,85%	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 dokumen	3.216.858.000	3.000.000.000			
9	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba							633.048.351	638.560.351	DAU	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan	

			produk unggulan lokal														ngan dan Perindustrian Kabupaten Toba
3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUKI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri										633.048.351	638.560.351					
3.31.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan, Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik				Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	56%	Data izin industri yang dipantau	14 izin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan	4 dokumen	310.250.000	315.762.000					

									usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem ODS						
3.31.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	56%	Data izin industri yang dipantau	14 izin	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	4 dokumen	322.798.351	322.798.351			

	3.31.04.2.01 .01	Sub Kegiatan Fasilitas, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data industri, Data Kawasan Industri Serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2 Dokumen	Data Industri	4 dokumen	Jumlah Dokumen hasil fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	4 dokumen	500.000.000	525.000.000			
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
11	3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba							80.516.382	84.542.000	DAU	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perd	

			dan produk unggulan lokal															aga n dan Peri ndu stria n Kab upat en Toba
	3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang										80.516.382	84.542.000					
	3.30.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang				Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/UTS/SIUP Toko Swalayan)	32,68 %	Meningkatnya Jumlah Gudang yang memiliki izin	50 gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 dokumen	80.516.382	84.542.000					
12	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba							1.498.750.000	1.952.500.000	D A U	Dina s Kop eras i, Usa ha Keci l Men eng			

			pariwisata, pertanian dan produk unggulan lokal															ah, Perd aga nga n dan Peri ndu stria n Kab upat en Toba
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											1.498.750.000	1.952.500.000					
3.30.03.2.01 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	12,5%	Pembanguna n dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan terlaksana dengan baik	3 pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagang an	1 unit	898.750.000	1.302.500.000					
3.30.03.2.01 .02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	12,5%	Pembanguna n dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan terlaksana dengan baik	3 pasar	Jumlah Fasilitasi pengelolaa n Sarana Distribusi Perdagang an	50 unit usaha	600.000.000	650.000.000					

13	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan produk unggulan lokal	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba						916.625.000	756.246.000	D A U	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba
	3.30.04.2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									110.250.000	115.762.000		

3.30.04.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,78 %	Meningkatnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang penting di Kabupaten Toba	4 laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	4 laporan	110.250.000	115.762.000			
3.30.04.2.02	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>										751.250.000	582.603.000			
3.30.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan				Persen Stabilitas dan Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,78 %	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dapat terkendali Dengan baik	2 Pasar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	4 laporan	200.000.000	210.000.000			

										Perdagangan						
3.30.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota				Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,78 %	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dapat terkendali Dengan baik	2 Pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	4 laporan	551.250.000	372.603.000				
3.30.04.2.03	<i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>										55.125.000	57.881.000				
3.30.04.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,78 %	Pendistribusi an Pupuk Bersubsidi ke kelompok tani oleh distributor dan pengecer terlaksana	10 Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 laporan	55.125.000	57.881.000				

		Tera Ulang dan Pengawasan														
	3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	17,49 %	UTTP yang sudah diteradan tera ulang	100%	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan alat Perlengkapan Ditera Ulang	600 unit	906.950.000	1.050.000.000			
	3.30.06.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyaluran Metrologi Legal				Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	17,49 %	UTTP yang sudah diteradan tera ulang	100%	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	195.125.000	168.131.000			
15	3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pembangunan Ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor pariwisata, pertanian dan	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja. 2. Menurunkan Angkat Kemiskinan.	Kabupaten Toba							661.250.000	778.812.000	DAU	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan	

			produk unggulan lokal												ngan dan Perindustrian Kabupaten Toba
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										661.250.000	778.812.000			
3.30.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	6 Jenis	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terlaksana dengan baik	100%	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	10 UMKM	451.250.000	578.812.000			

3.30.07.2.01 .03	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	6 Jenis	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terlaksana dengan baik	100%	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4 Dokumen	210.000.000	200.000.000			
Jumlah											17.317.499.813	17.485.821.805			

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023.

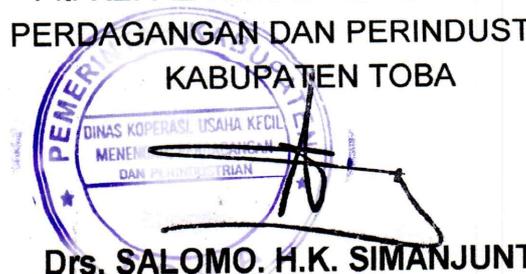
Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023.

BALIGE,

2022

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA



Drs. SALOMO. H.K. SIMANJUNTAK
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680601 198903 1 004

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	100 Persen	2 Unit	100 Persen	58,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	88,200,000
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,010,637,000					1,013,669,000
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	60,637,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	63,669,000
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	950,000,000
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								256,377,080					344,137,954
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	100 Persen	4 Unit	100 Persen	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	158,000,000
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	100 Persen	4 Unit	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	10,000,000
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	100 Persen	102 Unit	100 Persen	67,000,000			Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	70,000,000
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	100 Persen	1 Unit	100 Persen	26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	68,250,000
2 17 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	100 Persen	1 Unit	100 Persen	45,127,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	37,887,954
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								105,000,000					100,000,000
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								105,000,000					100,000,000
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,56 Persen	52 Unit Usaha	7 Unit Usaha	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56 Persen	100,000,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								315,000,000					200,000,000
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								315,000,000					200,000,000
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Meningkatnya Jumlah SDM Koperasi yang berkualitas	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,97 Persen	80 Orang	80 Orang	315,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	8,97 Persen	200,000,000
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								105,000,000					200,000,000
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								105,000,000					200,000,000
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kab. Toba, Laguboti, Ompu Raja Hutapea	5,61 Persen	7 Unit Usaha	100 Persen	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koperasi Yang Berkualitas	5,61 Persen	200,000,000
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								618,050,000					706,209,000
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								618,050,000					706,209,000
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,80 Persen	4 Dokumen	100 Persen	77,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80 Persen	78,000,000
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,80 Persen	15 Unit Usaha	100 Persen	270,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80 Persen	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	kepentingan Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,80 Persen	30 Unit Usaha	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80 Persen	100,000,000
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,80 Persen	15 Unit Usaha	100 Persen	120,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80 Persen	378,209,000
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,80 Persen	8 Orang	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1,80 Persen	50,000,000
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								580,000,000					500,000,000
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								580,000,000					500,000,000
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,12 Persen	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	580,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	6,12 Persen	500,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								4,259,216,382					4,790,231,000
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								80,516,382					84,542,000
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang								80,516,382					84,542,000
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Meningkatnya Jumlah Gudang yang memiliki izin	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,68 Persen	4 Dokumen	50 Gudang	80,516,382	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	32,68 Persen	84,542,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								1,498,750,000					1,952,500,000
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								1,498,750,000					1,952,500,000
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,5 Persen	1 Unit	3 Pasar	898,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	12,5 Persen	1,302,500,000
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,5 Persen	50 Unit	3 Pasar	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	12,5 Persen	650,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								916,625,000					756,246,000
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								110,250,000					115,762,000
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Meningkatnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang penting di Kabupaten Toba	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,78 Persen	4 Laporan	150 Pelaku Usaha	110,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,78 Persen	115,762,000
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								751,250,000					582,603,000
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dapat terkendali dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,78 Persen	4 Laporan	2 Pasar	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,78 Persen	210,000,000
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dapat terkendali dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,78 Persen	4 Laporan	2 Pasar	551,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,78 Persen	372,603,000
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								55,125,000					57,881,000
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Pendistribusian Pupuk Bersubsidi ke kelompok tani oleh distributor dan pengecer terlaksana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,78 Persen	4 Laporan	10 Pelaku Usaha	55,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,78 Persen	57,881,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		dengan Realisasi Minimal 90%												
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									1,102,075,000				1,218,131,000
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									1,102,075,000				1,218,131,000
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	UTTP yang sudah ditera dan tera ulang	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,49 Persen	600 Unit	100 Persen	906,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	17,49 Persen	1,050,000,000	
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	UTTP yang sudah ditera dan tera ulang	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,49 Persen	120 Orang	100 Persen	195,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	17,49 Persen	168,131,000	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									661,250,000				778,812,000
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									661,250,000				778,812,000
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Jenis	10 UMKM	100 Persen	451,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	6 Jenis	578,812,000	
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Jenis	4 Dokumen	100 Persen	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	6 Jenis	200,000,000	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									5,020,406,351				4,513,560,351
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									3,887,358,000				3,350,000,000
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									3,887,358,000				3,350,000,000
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,85 Persen	4 Dokumen	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Industri	6,85 Persen	0	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,85 Persen	4 Dokumen	100 Persen	320,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Industri	6,85 Persen	300,000,000	
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,85 Persen	4 Dokumen	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Industri	6,85 Persen	50,000,000	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten terlaksana dengan baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,85 Persen	4 Dokumen	100 Persen	3,216,858,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Industri	6,85 Persen	3,000,000,000	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI									633,048,351				638,560,351
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									633,048,351				638,560,351
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Data izin industri yang dipantau	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	4 Dokumen	14 Izin	310,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	56 Persen	315,762,000	
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Data izin industri yang dipantau	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	4 Dokumen	14 Izin	322,798,351	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	56 Persen	322,798,351	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									500,000,000				525,000,000
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									500,000,000				525,000,000
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data Industri	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2 Dokumen	525,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
					TOTAL			17,317,499,813				17,485,821,805